

BAB II

PROFIL DESA

2.1. SEJARAH/ASAL USUL DESA RESAPOMBO

2.1.1. Asal Usul Nama Desa Resapombo

Untuk menggali sumber data berdirinya Desa Resapombo, Pemerintah desa telah mengundang tokoh masyarakat dan beberapa warga yang setidaknya mengetahui sejarah berdirinya desa antara lain:

- Bapak : MUKIJO
Umur : 79 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun Resapombo Krajan Rt. 01 Rw.03
- Bapak : GUNO SAMSU
Umur : 77 Tahun
Pekerjaan : Veteran
Alamat : Dusun Resapombo Krajan Rt. 03 Rw.02
- Bapak : MUL MESERAN
Umur : 76 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dusun Resapombo Rt. 02 Rw.05
- Bapak : Drs. YB. SUNARNO
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dusun Resapombo Rt. 05 Rw.02

Beliru menuturkan dari cerita nenek moyang yang diceritakan turun temurun bahwa Desa Resapombo dulunya adalah hutan belantara. Pada jaman penjajahan Belanda yang di pimpin oleh Tuan Warcell dan Tuan Essling hutan tersebut di tebang dan di jadikan perkebunan kopi, karet dan teh serta kakao. Tak lama kemudian juga didirikan pabrik – pabrik untuk pengolahan hasil pertanian serta perkantoran, perumahan dan loji – loji untuk tempat peristirahatan orang – orang Belanda.

Dari orang – orang pribumi yang menjadi pekerja kemudian membentuk suatu tatanan kekuasaan di tingkat persil yang dipimpin oleh seorang Polo Kampung yang bernama JOYO BUNG

yang menjadi Polo Kampung sejak 1905 s.d. 1920. Karena persil tempat JOYO BUNG berkuasa berada pada daerah yang cukup tinggi dan dari daerah ini dapat untuk melihat daerah – daerah lain yang berada di selatan yang letak geografisnya lebih rendah maka persil ini dinamakan **NYAWANGAN**.

Karena tarmpuk kepemimpinan Polo Kampung yang bernama JOYO BUNG meninggal dunia akhirnya digantikan oleh KASMOREJO yang menjadi Polo Kampung sejak 1920 s/d 1942. KASMOREJO meninggal digantikan oleh KARSONAWI yang menjadi Polo Kampung tahun 1942 s.d. 1945. Setelah itu Polo Kampung berikutnya adalah Bapak BOIMAN.

Kemudian pada tahun 1946 Nyawangan mulai ditata untuk menjadi suatu desa dengan membagi tanah perkebunan atau persil menjadi hak-hak garap penduduk Nyawangan melalui Program P4AKS. Setelah tanah-tanah diserahkan kepada penduduk dan sebagian di tata untuk ^{tanah kar desa} tanah bengkok sebagai ganjaran paming desa barulah pada tahun 1947 tepatnya hari **KAMIS KLIWON Tanggal 17 April** atau Selo tanggal 23 Nyawangan diubah menjadi Desa Sementara yang diberi nama **Desa RESAPOMBO** oleh Bpk. Boiman. Dan Polo Kampung berubah menjadi Lurah. **RESAPOMBO** dijadikan nama desa karena di tempat ini dulunya banyak "rumpun resapan" yang sangat luas ("ombo") yang terhampar mulai utara Gunung Gogoniti sampai lereng Gunung Kawi.

Dari Desa Sementara pada tahun 1947 kemudian pada tahun 1949 menjadi Desa Darurat sampai tahun 1968. Baru pada tahun 1969 Resapombo menjadi Desa Resmi dengan Kepala Desa yang pertama Bpk. BOIMAN yang menjabat mulai Tahun 1969 s/d 1972.

2.1.2. Sejarah Tokoh / Kepala Desa Resapombo

Pejabat yang pernah memimpin Desa Resapombo, yaitu :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Nama | : Boiman |
| 2. Menjabat tahun | : 1946 s/d 1972 |
| 3. Nama | : SUHARDI |
| Menjabat tahun | : 1972 s/d 1974 |
| 4. Nama | : PUTIT HADI |
| Menjabat tahun | : 1974 s/d 1975 |

5. Nama	: MARDIONO
Menjabat tahun	: 1975 s/d 1990
6. Nama	: WISNU PRANOTO
Menjabat tahun	: 1990 s/d 1998
7. Nama	: B. BUDI RAHARJO
Menjabat tahun	: 1998 s/d 2006
8. Nama	: H.A. MIJLYONO
Menjabat tahun	: 2007 s/d 2013

2.2. LETAK GEOGRAFIS DESA

Kebijakan sektoral pembangunan di Kabupaten Blitar diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di segala lapisan secara merata, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya, sehingga kedepan pelaksanaan pembangunan di Desa Resapombo dapat benar-benar mencerminkan keterpaduan dan keserasian antar program-program sektoral, dengan demikian sumber-sumber potensi daerah dapat di optimalkan pemanfaatannya dan dapat dikembangkan secara merata.

Pelaksanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya, dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat, maka pertumbuhan dan perkembangan kecamatan akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan Desa yang ada di sekitarnya.

Desa Resapombo yang secara struktural merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem perwilayahan Kecamatan Doko, secara geografis Desa Resapombo terletak pada wilayah utara jalur alternatif transportasi darat, memiliki potensi yang cukup strategis yang terbagi menjadi 4 Dusun, yakni: Dusun Resapombo, Dusun Sumberarum, Dusun Tlogoarum dan Dusun Klakah dengan perbatasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Kulon Bambang dan hutan Gunung Kawi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalimanis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kemirigede
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Resapombo Desa Kemirigede.

Desa Resapombo Kecamatan Doko yang merupakan daerah otonom Desa dengan jumlah penduduk 9.421 jiwa yang terdiri dari 4.023 jiwa penduduk laki-laki dan 5.428 jiwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan.

Potensi Desa Resapombo cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum.

Secara umum potensi Desa Resapombo dapatlah didiskripsikan dengan berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa aspek dimaksud adalah sebagai berikut :

2.2.1. ASPEK SUMBER DAYA APARATUR/PERANGKAT DESA

Desa Resapombo secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dikelola oleh 2 (dua) elemen utama, yakni elemen Pemerintah Desa yang dipimpin langsung oleh kepala Desa beserta jajaran Perangkat Desa yang terdiri dari :

Tabel SDM Aparatur Pemerintah Desa

NO	NAMA	JABATAN	USIA	Masa Jabatan	Pendidikan
1	H.A. Mulyono	Kepala Desa	38	6 tahun	SMA
2	Sunardi	Sekretaris Desa	45	S/d 60 th	SMA
3	J.EddyPurwanto	Kaur Keuangan	52	S/d 60 th	SMA
4	Muji Astutik	Kaur Umum	46	S/d 60 th	DIII
5	-	Kaur Pembangunan	-	-	-
6	Siswo Prihono	Kaur Pemerintahan	33	S/d 60 th	SMA
7	Jiono	Kaur Kesra	44	S/d 60 th	SMA
8	Surono	Kasun Resapombo	42	S/d 60 th	SMEA
9	Karto Kateni	Kasun Bulurejo	65	S/d 60 th	SD
10	Agung Sutoto	Kasun Salamrejo	38	S/d 60 th	SMP
11	Suwaji	Kasun Purworejo	42	S/d 60 th	SMP
12	Seno	Kasun Tulungrejo	56	S/d 60 th	SD
13	Purwaji	Kasun Wonorejo	47	S/d 60 th	SLTP
14	Mul Gimani	PTL (Jogo Tirta Dsn. Resapombo)	71	S/d 60 th	SD
15	Boiman	PTL (Jogo Tirta Dsn. Tulungrejo)	43	S/d 60 th	SLTP
16	Suwito	PTL (Modin Dsn. Wonorejo)	62	S/d 60 th	SD
17	Sukri	PTL (Jogo Tirta Dsn. Tulungrejo)	48	S/d 60 th	SD

18	Suwanto	PTL (Jogo Tinto Dsn. Bulurejo)	49	S/d 60 th	SD
19		PTL (Bayan Dsn. Purworejo)			
20		PTL (Jogo Boyo Dsn. Salamrejo)			
21	Seran	PTL (Petugas Kebersihan Kantor)	54	S/d 60 th	SD

Selain komponen Perangkat Desa, elemen terpenting sebagai mitra penyelenggaraan Pemerintahan dan permusyawaratan di Desa Resapombo adalah keberadaan BPD, Namun apapun nama dan fungsi keberadaan lembaga ini tetap dibutuhkan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah komponen atau elemen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran serta aktifnya dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Keberadaan LPMD dan PKK yang juga merupakan representasi warga masyarakat secara umum dapat memfungsikan dirinya sebagai agen dan fasilitator pembangunan di tingkat Desa.

2.2.2. ASPEK EKONOMI

Perekonomian Desa Resapombo secara umum di dominasi pada sektor pertanian, yang sistem pengelolanya masih sangat tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Produk pertanian Desa Resapombo masih monoton pada unggulan cengkeh dan kopi, hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian di luar sentra tanaman hortikultura dan persoalan mendasar lainnya adalah sistem pengairan yang kurang baik sehingga berdampak adanya kekurangan air jika pada saat musim kemarau.

Oleh karenanya diperlukan langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya-upaya: Perbaikan sistem irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak terkait (Dinas

Pengairan, Dinas Pertanian). Sedangkan untuk lahan kering (tegal) produk unggulan masih di dominasi oleh tanaman ^{polikultur} tumpang sari. Di samping itu masih banyak lahan yang belum termanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan, pengadaan bibit-bibit tanaman produktif dengan melibatkan instansi terkait (Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan).

- Luas wilayah tata guna lahan

Luas Tanah lebih kurang 1.233 Ha terdiri dari:

No.	Nama Tanah	Luas	
1	Tanah Pekarangan	385.50	ha
2	Tanah Tegalan	628.60	ha
3	Tanah Sawah	229.50	ha
4	Tanah sungai	5.00	ha
5	Tanah Lapangan	3.75	ha
6	Tanah kuburan	2.00	ha
7	Jalan Desa dan Jalan PUD	21.25	ha
8	Tanah Sekolah	0.35	ha
9	Kantor Desa dan Balai Dusun	0.12	ha
10	Tanah Wakaf	0.63	ha
11	Tanah Bando Deso	15.00	ha
Total		1,291.70	ha

- Administrasi Pemerintah

Desa adalah wilayah Desa sebagai perangkat daerah Kabupaten / Kota dalam wilayah kerja Kecamatan

Adapun dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan adalah :

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108 Tambah Lembaran Negara RI Nomor 45, 48) perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Kelurahan.

Selanjutnya hal – hal yang berkaitan dengan Pemerintah Desa sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang – undang, namun demikian dalam masa kedepan perlu adanya upaya untuk penguatan Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.2.3. ASPEK SOSIAL BUDAYA

Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukan masih rendahnya kualitas dari sebagian SDM masyarakat di Desa Resapombo, serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa. Di samping itu masyarakat Desa Resapombo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Munculnya masalah kemiskinan, ketenaga kerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Kondisi ini akan dapat menjadi pemicu timbulnya benih kecemburuan sosial dan sengketa yang berkepanjangan, jika tidak diselesaikan sejak dini.

2.2.4. ASPEK PENDIDIKAN, KESEHATAN & KESEJATERAAN SOSIAL.

Desa Resapombo dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini cukup mantap, hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah penduduk buta huruf. Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai, dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan.

Sarana penunjang pendidikan :

- TK : 11 Unit
- SD : 6 Unit

- SMP/ MTs : 2 Unit
- SMK : 1 Unit

Ketidak mampuan sarana/infrastruktur ekonomi dan bisnis dalam upaya menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di Desa, berakibat pada timbulnya pengangguran, yang akan berdampak pada timbulnya menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Adanya kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) juga berpengaruh pada penurunan tingkat perekonomian warga yang ditunjukkan dengan adanya meningkatnya jumlah penduduk miskin, menurunnya daya beli masyarakat, adanya PHK dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Dalam kondisi seperti ini Pemerintah Desa harus mampu mengatasi persoalan-persoalan mungkin akan timbul akibat dari adanya dampak kenaikan BBM dengan mengadakan program-program pemberdayaan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Tabel Sarana Kesehatan Masyarakat

Palang Merah Indonesia (PMI)	-
Polindes	-
Posyandu	Ada
Praktek Pribadi	Ada
Tenaga Medis/Para Medis	Ada
Dukun Bayi Terdidik	-

Tabel Jumlah Kepala Keluarga

Jumlah Kepala Keluarga	2475
Jml Keluarga Pra Sejahtera	1.248
Jml Keluarga Sejahtera 1	795
Jml Keluarga Sejahtera 2	297
Jml Keluarga Sejahtera 3	126
Jml Keluarga Sejahtera Plus	9

Berdasarkan data yang ada tersebut diatas, disamping merupakan sumber potensi yang ada, juga bisa menjadi berbagai persoalan/masalah yang merupakan dampak dari perkembangan situasi yang ada. Dalam rangka memecahkan berbagai persoalan yang ada, maka Pemerintah Desa Resapombo perlu menyiapkan berbagai strategi kegiatan yang sinergis atau kerjasama dengan semua institusi atau komponen baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

2.2.5. ASPEK PEMUDA DAN OLAH RAGA

Masalah pemuda dan kepemudaan yang merupakan hasil dari besarnya jumlah penduduk dengan komposisi usia muda, memerlukan perhatian serius. Mengingat munculnya permasalahan-permasalahan kenakalan remaja, pengangguran, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan tindak kriminal, bagaimanapun juga akan menjadi ancaman dalam kegiatan pembangunan Desa.

Sejalan dengan kondisi itu, serta dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dalam kelompok usia muda, maka program-program yang mampu menyerap aspirasi pemuda dengan aktualisasi peran pemuda, pengembangan bakat dan minat, serta pengentasan/pengurangan angka pengangguran perlu strategi program yang jelas. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah generasi muda yang terjebak ke dalam tindak/perilaku yang kurang baik. Kesemuanya ini sangat terkait dengan pembinaan mental, sosialisasi nilai-nilai kemasyarakatan, masalah pendidikan, pembinaan olah raga, pengembangan sanggar seni budaya generasi muda serta aktivitas kemasyarakatan yang mampu menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, dan kemandirian para pemuda serta penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi generasi muda. Sejalan dengan itu, maka penyediaan sarana dan prasarana olah raga, sarana organisasi kepemudaan, keagamaan, perlu terus dikembangkan dan dibiayai agar menjadi tempat yang cukup menarik bagi sebagian besar generasi muda. di sisi lain, masalah pendidikan budi pekerti, etika dan estetika, perlu dipikirkan kembali untuk menjadi muatan Desa, sedang di bidang keagamaan yang telah ada perlu terus di dukung eksistensi dan pengembangan serta keberlangsungannya.